

LAPORAN

SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA

2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai perwujudan komitmen pemerintah terhadap pencegahan korupsi. Peraturan tersebut kemudian menjadi pedoman umum bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Di lingkungan Kementerian Perindustrian, Pembangunan Zona Integritas dimulai dengan pencaanangan oleh Menteri Perindustrian, Saleh Husin, secara simbolis dengan menandatangani naskah dan piagam zona integritas, disaksikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi beserta Pimpinan KPK Zulkarnain dan Anggota Ombudsman RI Bidang Pencegahan Muhammad Khoirul Anwar di ruang Garuda, Kementerian Perindustrian, Jakarta pada tanggal 7 April 2015.

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan melalui komponen pengungkit dan komponen hasil, yang masing-masing terdiri atas :

1. Komponen Pengungkit

- a) Manajemen perubahan;
- b) Penataan tatalaksana;
- c) Penataan sistem manajemen sumber daya manusia;

- d) Penguatan akuntabilitas kinerja;
- e) Penguatan pengawasan; dan
- f) Penguatan kualitas pelayanan publik.

2. Komponen Perubahan

- a) Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN; dan
- b) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Politeknik ATK Yogyakarta merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. Melalui IPK, Politeknik ATK Yogyakarta dapat diukur capaiannya dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1. Tujuan

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk referesi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2.2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah secara bertahap mewujudkan Politeknik ATK Yogyakarta yang Bebas dari Korupsi serta wilayah birokrasi Bersih dan Melayani.

1.3 LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
- f) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

BAB II

METODOLOGI

2.1 PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

Survei IPK terhadap pelayanan **Politeknik ATK** dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (e-survey) sebagai alat pengumpul data kepada populasi responden yaitu mahasiswa dan orang tua selaku pengguna layanan Politeknik ATK Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu mahasiswa aktif dan orang tua mahasiswa aktif.

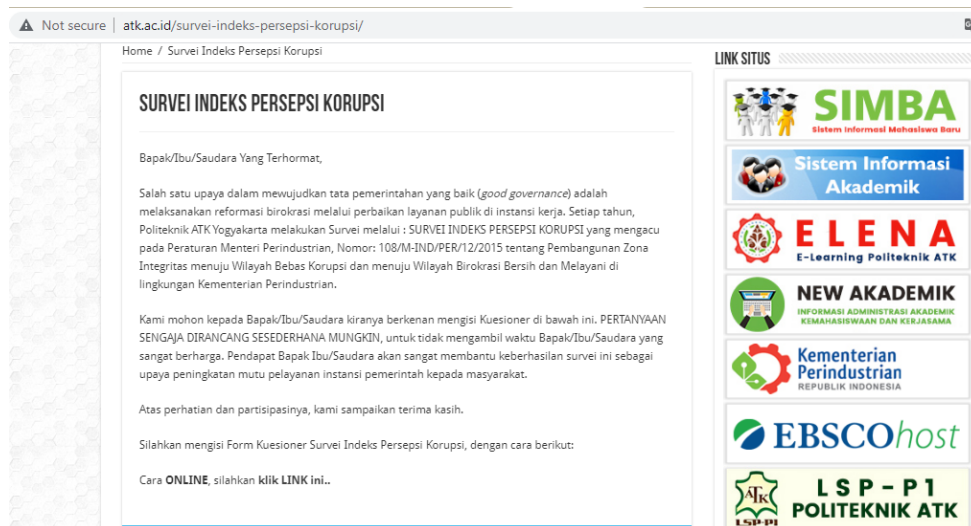
2.2. TAHAPAN SURVEI

Tahapan survei IPK Politeknik ATK meliputi persiapan dan proses survei. Tahap persiapan meliputi :

- a) Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei IPK.
- b) Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c) Membuat database calon responden survei.
- d) Membuat surat penyampaian kepada mahasiswa dan orang tua mahasiswa untuk mengisi e-survey.

Sementara itu proses survei meliputi :

- a) Pelaksanaan e-survey dilakukan dalam jangka waktu 7 hari kalender yang dimulai pada tanggal 21 April sampai dengan 27 April 2022.
- b) Melakukan penyebaran informasi survey kepada mahasiswa melalui admin program studi.
- c) E-survey dilakukan dengan mengakses pada link <http://www.atk.ac.id/survei-indeks-persepsi-korupsi/>



- d) Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survey untuk mengetahui perkembangan e-survey.

2.3 TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis data untuk menentukan IPK menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan IPK masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan IPK pada kuesioner dilakukan dengan cara menentukan bobot total dari masing-masing indikator dan kemudian mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI. Hasil akhir akan memunculkan Indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel 1 Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut :

Tabel 1 Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00 -1,75	25 - 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Bersih dari Korupsi

BAB.III

HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

4.1. PROFIL RESPONDEN

Jumlah responden survei IPK terhadap pelayanan Politeknik ATK mencapai 144 responden terdiri dari

a) Jenis kelamin

	Mahasiswa (orang)	Orang Tua Mahasiswa (orang)
Laki-Laki	48	
Perempuan	94	2

b) Pendidikan terakhir

	Mahasiswa (orang)	Orang Tua Mahasiswa (orang)
SD		
SMP		
SMU/SMK/Sederajat	142	1
D1-D3		1
S1/ DIV		
S2		
S3		

c) Pekerjaan

No	Pekerjaan	Orang Tua Mahasiswa (orang)
1	PNS/ASN/TNI/PolRI	
2	Wiraswasta	
3	Pegawai Swasta	1
4	Petani	
5	Buruh	

6	Lainnya	1
---	---------	---

4.2. INDEKS PERSEPSI KORUPSI PER INDIKATOR

Pada pembahasan survey IPK ini akan memaparkan hasil tingkat Persepsi korupsi dalam pelayanan Politeknik ATK dengan responden berupa mahasiswa dan orang tua mahasiswa Politeknik ATK Yogyakarta. Adapun indikator di sektor persepsi korupsi meliputi :

- a) Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
- b) Petugas pelayanan memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- c) Tidak terdapat praktek pen-caloran/perantara yang tidak resmi
- d) Petugas pelayanan tidak diskriminatif
- e) Tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan
- f) Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan
- g) Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan
- h) Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia/diminta
- i) Tidak diskriminatif dalam penanganan pengaduan

Hasil penilaian rata-rata persepsi korupsi Politeknik ATK Yogyakarta dari responden Mahasiswa dan orang tua mahasiswa Politeknik ATK Yogyakarta adalah sebagaimana tampak dalam tabel 2.

No	Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	Mutu Pelayanan
----	------------	-----------------	----------------

1	Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	3,5	A
2	Petugas pelayanan memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan	3,55	A
3	Tidak terdapat praktek pen-calo an/perantara yang tidak resmi	3,70	A
4	Petugas pelayanan tidak diskriminatif	3,56	A
5	Tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan	3,74	A
6	Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan	3,74	A
7	Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan	3,63	A
8	Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar8. produk/jasa layanan yang tersedia/diminta	3,63	A
9	Tidak diskriminatif dalam penanganan pengaduan	3,56	A
Nilai rata rata		3,62	A
Indeks Persepsi Korupsi		90,59	

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa seluruh indikator memiliki nilai persepsi dengan mutu layanan A, dengan nilai persepsi rata-rata terendah adalah indikator pertama dengan nilai 3,5. Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil bahwa nilai persepsi korupsi Politeknik ATK Yogyakarta dipersepsikan BERSIH DARI KORUPSI oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Nilai IPK yang diperoleh sebesar 90,59 (kisaran nilai BERSIH DARI KORUPSI adalah 81,26 – 100,00).

BAB.IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

- a) Secara umum, hasil survei persepsi korupsi pada Politeknik ATK Yogyakarta diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi 90,59 atau masuk kategori BERSIH DARI KORUPSI (kisaran nilai 81,26 – 100,00). Dengan demikian, Politeknik ATK Yogyakarta dalam memberikan pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
- b) Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu pada indikator pertama yang dinilai bersih dari korupsi dan kemungkinan masih cukup berpotensi adanya KKN meskipun prosentasinya kecil. Dengan demikian, ke depan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka prosedur pelayanan haruslah ditinjau kembali sehingga meminimalisir potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil e-survey IPK terhadap pelayanan Politeknik ATK Yogyakarta, maka perlu upaya untuk meninjau kembali prosedur dan kebijakan sehingga indeks persepsi korupsi di Politeknik ATK Yogyakarta dapat mencapai kategori Bersih dari Korupsi